

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DAN LUAS WILAYAH TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN
PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERASI**
(Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera
Tahun 2021-2023)

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang*



Oleh:

Hanifah Zahra

2021/21043088

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Luas Wilayah
terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel
Moderasi**

*(Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Tahun
2021-2023)*

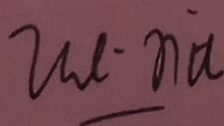
Nama	: Hanifah Zahra
NIM / TM	: 21043088 / 2021
Departemen	: Akuntansi
Keahlian	: Akuntansi Sektor Publik
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis

Padang, 19 Agustus 2025

Disetujui Oleh:

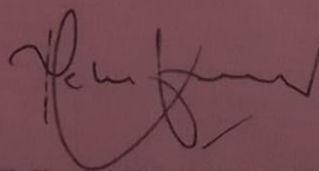
Mengetahui,

Kepala Departemen Akuntansi



Dr. Nelvirita, SE, M.Si, Ak
NIP. 197407061999032002

Dosen Pembimbing



Halkadri Fitra, SE, MM, Ak, CA
NIP. 198008092010121003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Padang*

Judul : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Tahun 2021-2023)

Nama : Hanifah Zahra

NIM / TM : 21043088 / 2021

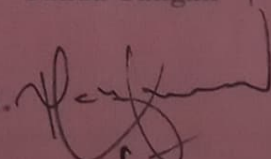
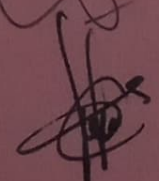
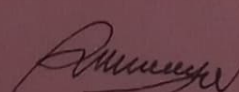
Departemen : Akuntansi

Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, 19 Agustus 2025

Tim Penguji:

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Halkadri Fitra, SE, MM, Ak, CA	1. 
2.	Anggota	Charoline Cheisviyanny S.E, M.Ak	2. 
3.	Anggota	Ridha Azka Raga, SE, MAk.	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hanifah Zahra
NIM/TM : 21043088/2021
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 29 Januari 2002
Program Studi : S1 Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Puri Cikarang Hijau Blok E7/18, Kab. Bekasi
Nomor Handphone : 085211162235
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Tahun 2021-2023)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/ skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis/ skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/ skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/ skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik telah diperoleh karena karya tulis/ skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, 13 September 2025
Saya yang menyatakan



Hanifah Zahra

21043088/2021

ABSTRAK

Zahra, H. (21043088/2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Tahun 2021-2023).

Pembimbing: Halkadri Fitra, SE, MM, Ak. CA

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan luas wilayah terhadap belanja modal, dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi, pada pemerintah daerah di Sumatera selama periode 2021–2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan total 246 pemerintah daerah di Sumatera selama periode 2021–2023. Data dianalisis menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan EViews 13. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan luas wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Artinya, semakin tinggi pendapatan asli daerah, semakin besar dana alokasi umum yang diterima, dan semakin luas wilayah, maka semakin tinggi pula kebutuhan dan kemampuan daerah dalam mengalokasikan belanja modal. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi hubungan antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan luas wilayah terhadap belanja modal.

Kata Kunci: Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Luas Wilayah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, memberikan kesehatan, kesempatan, dan kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas wajib untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Negeri Padang dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Tahun 2021-2023)”. Skripsi ini dapat diselesaikan tentunya tidak lepas dari bimbingan, bantuan, arahan, dan dukungan dari pihak terkait. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Teristimewa kepada Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Yudarman dan Ibu Artati, atas cinta, doa, dan kesabaran yang selalu menemani setiap langkah hidup saya. Dukungan, kasih sayang, dan motivasi yang tak pernah putus dari Bapak dan Ibu menjadi sumber kekuatan terbesar bagi saya untuk belajar, berjuang, dan akhirnya menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Perengki Susanto, SE., M.Sc., Ph.D selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.
3. Ibu Dr. Nelvirita, SE, M.Si, Ak selaku Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang yang telah memberikan arahan dalam menyelesaikan pendidikan.

4. Bapak Halkadri Fitra, S.E., MM, Ak. selaku dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, bimbingan, dan saran yang sangat berharga kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
5. Bapak Dr. Rino Dwi Putra, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan petunjuk dan arahan kepada penulis selama proses perkuliahan ini.
6. Ibu Charoline Cheisviyanny, S.E., M.Ak. selaku dosen penguji 1 yang telah memberikan telaah berupa saran, masukan, dan arahan untuk skripsi yang lebih baik.
7. Bapak Ridha Azka Raga, S.E., M.Ak. selaku dosen penguji 2 yang telah memberikan saran, masukan, dan arahan untuk skripsi yang lebih baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Departemen Akuntansi yang telah memberikan ilmu pengetahuan, motivasi, dan masukan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
9. Adikku tersayang, Dhiya Farras Haura yang selalu memberikan motivasi dan solusi dari keluh kesah yang penulis lalui dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Moch. Ichsan Zidan. Terimakasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun skripsi. Berkontribusi baik tenaga, waktu, menemani, mendukung, serta menghibur penulis dalam kesedihan, mendengarkan keluh kesah dan meyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan.

11. Teman-teman seperjuangan, Muharisa Syafelina, Finna Khairatun Hisanun Muhardi, dan teman-teman lainnya yang telah memberikan dukungan, semangat, dan bantuan kepada penulis selama proses menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mohon kritik dan saran yang membangun untuk kebaikan penulis kedepannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak terutama bagi penulis. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terimakasih.

Padang, Agustus 2025

Hanifah Zahra

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS ...	15
A. Kajian Teori	15
B. Penelitian Terdahulu	26
C. Pengembangan Hipotesis	35
D. Kerangka Konseptual	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Populasi dan Sampel	44
C. Jenis dan Sumber Data	46
D. Metode Pengumpulan Data	46
E. Definisi dan Pengukuran Variabel	47
F. Teknik Analisis Data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	64
B. Analisis Statistik Deskriptif	68
C. Uji Pemilihan Model	71

D. Uji Asumsi Klasik.....	74
E. Uji Model	77
F. Uji Hipotesis	79
G. Pembahasan.....	86
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Keterbatasan.....	95
C. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rasio Belanja Modal Pemerintah Kab/Kota Provinsi Sumatera Tahun 2021-2023	2
Tabel 2. Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3. Definisi Operasional Variabel.....	51
Tabel 4. Hasil Pemilihan Sampel	66
Tabel 5. Sampel Penelitian.....	66
Tabel 6. Analisis Statistik Deskriptif	69
Tabel 7. Hasil Uji Chow.....	72
Tabel 8. Hasil Uji Hausman	73
Tabel 9. Hasil Uji Lagrange Multiplier.....	73
Tabel 10. Hasil Uji Multikolinearitas	75
Tabel 11. Hasil Uji Autokorelasi	76
Tabel 12. Hasil Uji Heteroskedastisitas	77
Tabel 13. Hasil Uji Koefisien Determinasi	78
Tabel 14. Hasil Uji Simultan.....	79
Tabel 15. Hasil Uji Analisis Regresi Moderasi.....	80
Tabel 16. Hasil Uji Secara Parsial (Uji t).....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual	43
Gambar 2. Hasil Uji Normalitas	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan dalam permasalahan otonomi daerah sudah menjadi kewajiban, wewenang, serta hak daerah untuk mengatur dan mengurus daerah otonomnya. Kebijakan tersebut tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat, pelayanan publik menjadi lebih baik, pendapatan daerah bisa dioptimalkan, serta belanja daerah bisa difokuskan pada sektor-sektor yang produktif (Adyatama dan Oktaviani, 2015).

Pelaksanaan otonomi daerah dapat dilihat dari cara pemerintah daerah mengelola belanja daerahnya, terutama belanja modal. Pemerintah daerah biasanya mengalokasikan belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap guna mendukung pelayanan publik (Adyatama dan Oktaviani, 2015). Daerah diberi kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya dalam belanja modal dengan mengacu pada prinsip kewajaran, kebutuhan, serta kapasitas daerah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12/2019).

Pemerintah pusat menetapkan bahwa alokasi belanja modal direncanakan sekurang-kurangnya 30% dari total belanja daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015. Kemudian pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019, pemerintah daerah diamanatkan untuk mengalokasikan belanja modal dalam APBD minimal 30% dari total belanja daerah. Namun, hingga saat ini ketentuan tersebut belum sepenuhnya dijalankan secara optimal, terutama pada Kab/Kota di Sumatera. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1:

Tabel 1. Rasio Belanja Modal Pemerintah Kab/Kota Provinsi Sumatera Tahun 2021-2023

Provinsi	2021	2022	2023	Rata-rata
Aceh	15,86%	13,84%	9,94%	13,21%
Sumatera Utara	8,49%	17,76%	19,12%	15,12%
Sumatera Barat	13,27%	15,86%	14,27%	14,47%
Riau	14,95%	15,99%	16,74%	15,89%
Kepulauan Riau	14,53%	16,16%	15,49%	15,39%
Jambi	20,05%	19,00%	16,55%	18,53%
Sumatera Selatan	22,36%	23,07%	23,38%	22,94%
Bangka Belitung	17,38%	14,65%	16,61%	16,21%
Bengkulu	13,94%	14,39%	16,29%	14,87%
Lampung	11,97%	15,11%	17,13%	14,74%
Rata-rata	15,28%	16,59%	16,55%	16,14%

Sumber: BPS masing-masing provinsi tahun 2021-2023, diolah.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata rasio belanja modal terhadap total APBD di pemerintah kabupaten/kota Sumatera selama tahun 2021-2023 hanya mencapai 16,14%. Tidak ada satu pun pemerintah kabupaten/kota provinsi Sumatera yang berhasil mencapai angka 30% sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah pusat. Provinsi dengan rata-rata rasio belanja modal pemerintah kabupaten/kota tertinggi adalah Sumatera Selatan sebesar 22,94%, diikuti oleh Provinsi Jambi sebesar 18,53%. Sementara itu, Provinsi Aceh hanya mencatatkan rata-rata rasio belanja modal pemerintah kabupaten/kota sebesar 13,21%, yang menunjukkan

bahwa angka tersebut masih berada di bawah rata-rata seluruh provinsi di Sumatera.

Pada tahun 2022 realisasi belanja modal pemerintahan Sumatera Selatan hanya mencapai Rp929,16 miliar per Juni 2022 atau hanya 28,44% dari pagu anggaran tahun tersebut. Adapun realisasi belanja terendah tercatat di Kabupaten Lahat yaitu sebesar 17,63% dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) sebesar 14,63%. Rendahnya penyerapan belanja modal ini dipengaruhi oleh keterbatasan fiskal daerah yang ditunjukkan oleh minimnya kontribusi PAD, sementara alokasi DAU yang diterima dari pemerintah pusat sebagian besar terserap untuk belanja pegawai yaitu sebesar 28,34% atau Rp11,25 triliun. Selain itu juga adanya faktor lain seperti terjadi gagal lelang, pihak ketiga yang menunda pengajuan dokumen tagihan negara kepada PPK, membuat proses belanja modal menjadi tidak sesuai rencana. Padahal, Sumatera Selatan saat itu mencatat pertumbuhan ekonomi positif pascapandemi, sehingga rendahnya realisasi belanja modal menjadi ketidaksesuaian karena peluang untuk mendorong pembangunan infrastruktur tidak dimanfaatkan dengan optimal (sumsel.antaranews.com).

Pada tahun 2021, total belanja modal seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh hanya mencapai Rp4,49 triliun. Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan belanja barang dan jasa yang mencapai Rp6,31 triliun pada tahun yang sama (BPS Aceh, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa anggaran lebih banyak diarahkan untuk pengeluaran rutin dibandingkan pembangunan infrastruktur jangka panjang.

Hal serupa juga terjadi di Sumatera Barat, di mana sebagian besar anggaran pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2022 dialokasikan untuk belanja operasi, yaitu sebesar Rp15,10 miliar, sedangkan belanja modal hanya sebesar Rp2,90 miliar (BPS Sumatera Barat, 2022). Ketimpangan ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah cenderung lebih fokus pada kebutuhan operasional daripada investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Kurangnya optimalisasi alokasi anggaran pada pos belanja modal dapat menimbulkan sejumlah permasalahan, terutama terkait dengan keterbatasan pengadaan dan pemeliharaan fasilitas umum. Fasilitas umum seharusnya menjadi salah satu prioritas dalam belanja modal, karena perannya yang sangat penting dalam mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat (Priambudi, 2017). Namun pada kenyataannya, struktur belanja daerah masih banyak didominasi oleh belanja operasional, khususnya belanja barang dan jasa. Ketimpangan ini berdampak pada pertumbuhan aset daerah yang tidak sebanding dengan jumlah anggaran yang telah dialokasikan, sehingga efektivitas pembangunan daerah menjadi kurang maksimal (Marseno dan Mulyani, 2020).

Permasalahan belanja modal dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dikaji melalui pendekatan teori *stewardship*. Teori *stewardship* merupakan suatu keadaan di mana manajer tidak mementingkan kepentingan individu, melainkan lebih mengutamakan keinginan dan tujuan prinsipal serta mampu bertindak dengan tanggung jawab, menjunjung

integritas, dan bersikap jujur terhadap pihak lain (Donaldson dan Davis, 1991). Pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola penerimaan yang diterima dari rakyat selaku *principal* dalam bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut diwujudkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk pengalokasian belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dalam menunjang kesejahteraan masyarakat (Arethusa dan Terawati, 2025).

Infrastruktur yang memadai tidak hanya mendukung aktivitas masyarakat tetapi juga ikut mendorong pertumbuhan ekonomi (Waryanto, 2017). Oleh karena itu, jika pemerintah daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan belanja modal, maka perlu dilakukan upaya maksimal untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Adyatama dan Oktaviani, 2015). Selain PAD, terdapat beberapa faktor lain yang juga diduga mempengaruhi besar kecilnya alokasi belanja modal di suatu daerah, seperti pertumbuhan ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU), luas wilayah, kondisi infrastruktur, dan jumlah penduduk.

Adapun faktor yang bisa mempengaruhi belanja modal pemerintah daerah adalah kemampuan keuangan daerah, yang dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri (Susanti dan Fahlevi, 2016). PAD adalah pendapatan yang dihimpun dan dikelola secara mandiri oleh daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersumber dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli

Daerah yang Sah (Mahardika dan Riharjo, 2019). Besarnya belanja modal yang diperoleh akan bergantung pada jumlah PAD yang diterima. PAD menjadi salah satu sumber utama dalam pembiayaan pembangunan, khususnya pengadaan infrastruktur dan fasilitas publik melalui APBD setiap tahunnya (Mahardika dan Riharjo, 2019).

Fenomena pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera menunjukkan bahwa realisasi PAD masih sangat bervariasi dan berdampak pada kapasitas belanja modal yang dimiliki masing-masing pemerintah daerah. Pada tahun 2021 PAD Kota Medan tercatat sebesar Rp1,9 triliun dari total pendapatan Rp6,4 triliun, sementara Kabupaten Mandailing Natal hanya memperoleh PAD sebesar Rp94,4 miliar dari total pendapatan Rp1,4 triliun, yang menunjukkan ketimpangan kemampuan fiskal antar wilayah (BPS Sumatera Utara, 2021). Pada tahun 2021 Kota Banda Aceh, realisasi PAD mencapai Rp 222,29 miliar, hanya 66,6 % dari target Rp 327,19 miliar yang disepakati, ketika penerimaan daerah sangat terbatas dan diterima tidak secara sekaligus, maka proses realisasi belanja juga harus disesuaikan dengan kondisi tersebut (BPS Aceh, 2021). Dalam hal ini, daerah dengan PAD rendah cenderung mengandalkan dana transfer pusat dan menghadapi keterbatasan dalam mengalokasikan anggaran untuk belanja modal. Pemilihan Sumatera sebagai objek penelitian didasarkan pada keragaman karakteristik fiskal dan ekonominya, yang mencakup variasi dari daerah dengan PAD tinggi seperti Kota Medan hingga daerah ketergantungan tinggi pada transfer pusat seperti Kabupaten Mandailing Natal, serta pola

pembangunan yang berbeda dibandingkan Jawa yang relatif lebih merata atau Kalimantan dan Sulawesi yang memiliki sumber daya alam dominan seperti migas dan pertambangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Soesilo dan Asyik (2021); Huda dan Sumiati (2019) yang membuktikan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Nurlis (2016); Ayem dan Pratama (2018); Anny Widiasmara (2019) yang menyatakan bahwa DAU tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Selain PAD, belanja modal pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU). DAU berperan dalam mendukung pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan belanja modal, khususnya untuk pengadaan sarana dan prasarana guna meningkatkan kualitas layanan publik (Mahardika dan Riharjo, 2019).

Kondisi empiris pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera tahun 2021–2023 menunjukkan bahwa kontribusi DAU terhadap belanja modal sangat bervariasi. Di Kabupaten Pasaman, meskipun terjadi peningkatan DAU sekitar Rp20 miliar dalam APBD 2023, belanja modal justru menurun karena sebagian besar anggaran terserap oleh belanja pegawai akibat

rekrutmen P3K sebesar Rp50 miliar (pasamankab.go.id). Sementara itu, di Provinsi Sumatera Utara, meskipun DAU menyumbang hampir 37% dari total pendapatan kabupaten/kota pada tahun 2023, belanja modal rata-rata hanya dialokasikan sebesar 19% dari total belanja daerah (prp2sumut.sumutprov.go.id). Penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan Fahlevi (2016); Mahardika dan Riharjo (2019); Adyatama dan Oktaviani (2015); Priambudi (2017); Nasrullah et al. (2020) mengungkapkan bahwa DAU memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi memperkuat hubungan tersebut. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian Nurlis (2016); Ayem dan Pratama (2018); Anny Widiasmara (2019) yang menyatakan bahwa DAU tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Selain aspek fiskal, karakteristik geografis seperti luas wilayah juga menjadi variabel yang dapat mempengaruhi belanja modal daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 luas wilayah merupakan salah satu indikator kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana publik. Semakin luas suatu wilayah, maka semakin besar pula kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan dan penyediaan layanan publik (Maulana dan Fadhli, 2020).

Fenomena yang terjadi pada Kabupaten Mandailing Natal memiliki luas wilayah sebesar 6.547,26 km² dan pada tahun 2021 mengalokasikan belanja modal sebesar Rp103,4 miliar untuk pembangunan infrastruktur dasar dan akses antar wilayah (BPS Sumatera Utara, 2021). Sebaliknya,

Kota Sibolga yang hanya memiliki luas 41,31 km² mengalokasikan belanja modal pada tahun 2021 sebesar Rp87,1 miliar, difokuskan pada kebutuhan pemeliharaan fasilitas perkotaan dan pelayanan publik dalam wilayah yang lebih terkonsentrasi (BPS Sumatera Utara, 2021). Selain itu kondisi yang sama juga tercermin pada Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki luas wilayah sekitar 6.045,65 km² dan belanja modal pada tahun 2022 mencapai Rp263,1 miliar (BPS Sumatera Barat, 2022). Sebaliknya, Kota Solok yang wilayahnya hanya sekitar 58,72 km² mengalokasikan belanja modal pada tahun 2022 sebesar Rp99,2 miliar (BPS Sumatera Barat, 2022). Perbedaan alokasi tersebut menunjukkan bahwa daerah yang memiliki wilayah lebih luas cenderung membutuhkan belanja modal yang lebih besar dibandingkan dengan daerah yang wilayahnya kecil. Hal ini juga didukung oleh penelitian Maulana dan Fadhlia (2020); Afkarina dan Hermanto (2017) yang menyimpulkan bahwa luas wilayah berpengaruh terhadap belanja modal, terutama dalam menyesuaikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di seluruh wilayah daerah.

Faktor lain yang juga mempengaruhi belanja modal daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu parameter dari suatu keberhasilan pembangunan, dengan demikian semakin tinggi pertumbuhan ekonomi semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Sepriadi dan Mulyani (2021) menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan output per kapita yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan berlangsung secara

berkelanjutan dalam jangka panjang. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan mendorong pembangunan daerah, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan alokasi belanja modal di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel pemoderasi. Besarnya pertumbuhan ekonomi yang terdapat pada masing-masing daerah dapat memperkuat ataupun memperlemah hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan luas wilayah terhadap belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Adyatama dan Oktaviani (2015); Mahardika dan Riharjo (2019); Ayem dan Pratama (2018); Purwanto et al. (2022) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Sepriadi dan Mulyani (2021) dimana pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Pentingnya penelitian ini dilakukan karena hasil penelitian dapat menunjukkan faktor apa saja yang berpengaruh terhadap belanja modal. Selain itu, penelitian ini juga didasarkan pada temuan dalam penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yang menunjukkan perbedaan hasil terhadap pengaruh dari beberapa variabel. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena fokusnya berada pada 10 provinsi di Sumatera dengan cakupan seluruh kabupaten/kota yang ada, selama periode 2021–2023. Alasan pemilihan Pulau Sumatera sebagai objek penelitian adalah karena Pulau Sumatera terdiri dari berbagai provinsi dengan kondisi

ekonomi dan kebutuhan pembangunan yang sangat beragam. Selain itu, jumlah kabupaten/kota di Sumatera cukup banyak, dengan masing-masing daerah memiliki struktur pendapatan, belanja, dan prioritas pembangunan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana perbedaan karakteristik fiskal dan kondisi masing-masing daerah dapat mempengaruhi besarnya alokasi belanja modal oleh pemerintah daerah.

Penelitian ini mengacu pada studi Maulana dan Fadhlia (2020) yang meneliti tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dan luas wilayah terhadap belanja modal pemerintah daerah di Provinsi Aceh , serta penelitian Nasrullah et al., (2020) dengan judul *The Effect of Regional Dependence, Regional Independence, Effectiveness of Regional Original Fund (PAD), General Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund (DAK) on Capital Expenditure at District/City Government of Aceh Province, Indonesia*. Sebagai bentuk pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini menambahkan variabel moderasi yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah diduga dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara masing-masing variabel terhadap belanja modal daerah.

Penelitian ini juga mengacu pada penelitian Kuntari et al., (2019) yang berjudul *Capital Expenditure Of Local Governments*. Perbedaan dengan penelitian tersebut terletak pada wilayah dan waktu penelitian. Penelitian ini secara khusus mengambil objek di seluruh kabupaten/kota

yang berada di Sumatera. Selain itu, data yang digunakan dalam penelitian ini juga lebih baru, yaitu periode tahun 2021 hingga 2023.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Tahun 2021-2023)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Apakah PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah?
2. Apakah DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah?
3. Apakah luas wilayah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah?
4. Apakah pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi PAD daerah terhadap belanja modal pemerintah daerah?
5. Apakah pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh DAU terhadap belanja modal pemerintah daerah?
6. Apakah pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh luas wilayah terhadap belanja modal pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh signifikan PAD terhadap belanja modal pemerintah daerah.
2. Pengaruh signifikan DAU terhadap belanja modal pemerintah daerah.
3. Pengaruh signifikan luas wilayah terhadap belanja modal pemerintah daerah.
4. Peran pertumbuhan ekonomi dalam memoderasi pengaruh PAD terhadap belanja modal pemerintah daerah.
5. Peran pertumbuhan ekonomi dalam memoderasi pengaruh DAU terhadap belanja modal pemerintah daerah.
6. Peran pertumbuhan ekonomi dalam memoderasi pengaruh luas wilayah terhadap belanja modal pemerintah daerah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan penulis tentang pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, luas wilayah, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah Kab/Kota di Sumatera.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat berkontribusi secara pengerahan dalam rangka evaluasi kinerja pemerintah daerah setempat

untuk masa yang akan datang. Informasi mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan luas wilayah terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi akan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan pemerintahan daerah.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan, informasi, dan pengetahuan mengenai pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, luas wilayah, pertumbuhan ekonomi dan belanja modal pemerintah daerah Kab/Kota di Sumatera.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, diperoleh hasil analisis dengan kesimpulan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal Kab/Kota di Sumatera tahun 2021-2023. Artinya, semakin tinggi PAD yang dimiliki suatu daerah maka semakin besar pula alokasi anggaran yang dapat digunakan untuk belanja modal, seperti pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik.

Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal Kab/Kota di Sumatera tahun 2021-2023. Artinya, semakin besar dana alokasi umum yang diterima suatu daerah maka akan meningkatkan besaran belanja modal daerah tersebut.

Luas wilayah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal Kab/Kota di Sumatera tahun 2021-2023. Artinya, semakin luas wilayah suatu daerah, semakin besar pula kebutuhan anggaran belanja modal yang diperlukan untuk membangun dan memelihara sarana serta prasarana publik di wilayah tersebut.

Sementara, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Luas Wilayah terhadap belanja modal Kab/Kota di Sumatera tahun 2021-2023.

B. Keterbatasan

Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan penelitian, diantaranya:

1. Data pertumbuhan ekonomi tahun 2021 menunjukkan kondisi yang tidak stabil akibat dampak pandemi *covid-19*. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang bernilai negatif di beberapa kabupaten/kota, sehingga variabel pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi hubungan antara PAD, DAU, luas wilayah terhadap belanja modal. Kondisi ini menjadikan hasil penelitian pada tahun tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi normal.
2. Data penelitian hanya bersumber dari LHP LKPD yang telah diaudit BPK, sehingga tidak seluruh komponen belanja modal dapat dianalisis secara detail.

C. Saran

Dari keterbatasan di atas, peneliti berharap penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini dapat memaksimalkan penelitiannya dengan saran-saran berikut:

1. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah rentang waktu penelitian dan membandingkan periode sebelum serta setelah pandemi agar hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi yang lebih normal.
2. Diharapkan peneliti selanjutnya menambah sumber data seperti dari Statistik Keuangan Provinsi dari Badan Pusat Statistik sebab BPS

memiliki perbedaan definisi indikator antar provinsi, sehingga hasil penelitian dapat lebih akurat dan dapat dibandingkan antar daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyatama, E., & Oktaviani, R. M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Stikubank*, 4(19979–4878), 190–205.
- Afkarina, Z., & Hermanto, S. B. (2017). Pengaruh PAD, DAU, SiLPA Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6.
- Anggara, E., & Cheisviyanny, C. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2162–2184. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.205>
- Anny Widiasmara. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Total Aset dan Luas Wilayah, terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 2(1), 45–56. <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/jifa>
- Arethusa, T. A., & Terawati, M. T. (2025). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Periode 2021-2022*. 2(1), 616–632. <https://doi.org/https://doi.org/10.62237/jna.v2i1.209>
- Ayem, S., & Pratama, D. D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 2(2), 169–182. <https://doi.org/10.29230/ad.v2i2.2987>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. <https://aceh.bps.go.id/id>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. <https://sumbar.bps.go.id/id>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. <https://sumut.bps.go.id/id>
- Belanja Modal Di DAU Turun, DAK Naik, APBD Pasaman 2023 Sasar Program Urgen dan Strategis*. (2022). <https://pasamankab.go.id/berita/belanja-modal-di-dau-turun-dak-naik-apbd-pasaman-2023-sasar-program-urgan-dan-strategis>
- Boediono. (1985). *Ekonomi Makro*. BPFE.
- DJPb Ingatkan Kabupaten/Kota di Sumsel Percepat Belanja Modal. (2022).

<https://sumsel.antaranews.com/berita/663985/djpb-ingatkan-kabupatenkota-di-sumsel-percepat-belanja-modal>

- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Eksandy, A., Hakim, M. Z., & Ekawati. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Pada Pemerintah Provinsi Banten Periode 2011-2015). *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 85. <https://doi.org/10.31000/competitive.v2i2.917>
- Fisher, R. C., & Wassmer, R. W. (2015). An Analysis of State-Local Government Capital Expenditure During the 2000s. *Public Budgeting and Finance*, 35(1), 3–28. <https://doi.org/10.1111/pbaf.12062>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23* (Edisi 8). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariate dan Ekonometrika: Teori, Konsep dan Aplikasi dengan menggunakan EViews 10*. (Edisi 2). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Huda, S., & Sumiati, A. (2019). Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 14(1), 85–100. <https://doi.org/10.21009/wahana.14.016>
- Kresnandra, A. A. N. A. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Dana Perimbangan Dan Investasi Swasta Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 3, 302.
- Kuntari, Y., Chariri, A., & Prabowo, T. J. W. (2019). Capital expenditure of local governments. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 23(1).
- Mahardika, S. A., & Riharjo, I. B. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(11), 1–16.
- Marseno, B., & Mulyani, E. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Penduduk Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3452–3467. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i4.295>
- Maulana, F., & Fadhlia, W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 5(3), 1.

- Nasrullah, N., Ibrahim, R., Hakim, L., & Djalil, M. A. (2020). The Effect of Regional Dependence, Regional Independence, Effectiveness of Regional Original Fund (Pad), General Allocation Fund (Dau) and Special Allocation Fund (Dak) on Capital Expenditure at District/City Government of Aceh Province, Indonesia. *Cross Current International Journal of Economics, Management and Media Studies*, 2(5), 89–93. <https://doi.org/10.36344/ccijemms.2020.v02i05.001>
- Nurlis. (2016). The Factors Affecting of the Capital Expenditure Allocation Case : The Local Government of Indonesia. *Research Journal of Finance and Accounting*, 7(1), 107–113.
- Oates, W. E. (1972). *FISCAL DECENTRALIZATION AND ECONOMIC DEVELOPMENT*. 237–243.
- Pentury, M. A. (2011). Marthen Anthon Pentury. *Economic Journal of Emerging Markets*, 32.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023.*
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019.*
- Priambudi, W. (2017). Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013. *Jurnal Nominal*, VI(1), 136–147.
- Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara.* (2023). <https://prp2sumut.sumutprov.go.id/kabupaten-kota-2023>
- Purwanto, Rizki Indrawan, & Heryanti, A. N. (2022). Capital Expenditure Allocation Analysis Of Local Governments. *International Journal of Science, Technology & Management*, 3(2), 453–460. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v3i2.479>
- Putra, L. F., Mubiarto, N., & Embun Baining, M. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal. *Journal of Islamic Accounting Competency*, 3(2), 71–89. <https://doi.org/10.30631/jisacc.v3i2.2024>
- Raharjo, E. (2007). Teori Agensi Dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi. *Enterprise Risk Management*, 31–41.

https://doi.org/10.1142/9789814632775_0003

- Retno, N. D., & Widiatmoko, J. (2019). PAD, DAU, DAK, DBH, Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 8, 23–35.
- Sanjaya, D., & Helmy, H. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kekayaan Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Provinsi Se- Indonesia periode 2015-2019. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(2), 450–469. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i2.369>
- Sari, I. N., & Hermanto, S. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pad Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7, 2–19.
- Sepriadi, A., & Mulyani, E. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, PAD, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Bengkulu Tahun 2015-2019. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(2), 400–413.
- Soesilo, A. F., & Asyik, N. F. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Bantuan Provinsi, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 21.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susanti, S., & Fahlevi, H. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 183–191.
- Syaiful. (2006). *Pengertian Dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang Dan Belanja Modal Dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (2014).
- Waryanto, P. (2017). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 35–55. <https://doi.org/10.33105/itrev.v2i1.13>